

DUNIA ISLAM DIANTARA RIVALITAS AMERIKA SERIKAT DAN TIONGKOK

Ramdhan Muhaimin

Universitas Al-azhar Indonesia
ram.muhamin@gmail.com

Nizar Umar

Universitas Al-azhar Indonesia
nizar.umar@uai.ac.id

Dinda Ayuningtyas

Universitas Al-azhar Indonesia
dindaayuningtyas22@gmail.com

Abstract

This article discusses the dynamics of the rivalry between the United States and China in the last decade, as well as its influence on the Islamic world. Globally, the increasing of China's influence has fueled tensions with the United States (US). Especially since China declared a project of global economic-politic called One Belt One Road (OBOR) in 2013. The 'New Cold War' between US and China today has spread to various issues, from trade, cyber-technology, military, and health. This study uses a qualitative method in which content analysis is based on data obtained from news documents, articles and reports. From this research, it is concluded that the dynamic phenomenon in the Islamic world, such as the normalization of Arab-Israeli, the joining of Iran to the SCO, the issue of

the Uighur Muslim ethnicity, the Rohingya ethnic minority, the rejection of China's vaccine, and the declaration of defense of AUKUS alliances. Based on the neorealism approach in this study, the dynamics of the international structure affect the behavior of Muslim countries in making their rational choices.

Keywords: *Islamic World, Neorealism, Geopolitics, United States, China*

Abstrak

Artikel ini membahas dinamika rivalitas antara Amerika Serikat dengan Tiongkok dalam satu dasawarsa terakhir, serta pengaruhnya terhadap dunia Islam. Meningkatnya pengaruh politik dan ekonomi Tiongkok secara global telah memicu ketegangan dengan Amerika Serikat (AS) sebagai hegemon global selama ini. Peningkatan pengaruh ekonomi-politik Tiongkok terutama sejak Negeri Tirai Bambu tersebut mendeklarasikan proyek global ekonomi-politik bernama One Belt One Road (OBOR) pada tahun 2013. Perang Dingin AS dan Tiongkok melingkupi berbagai isu, mulai dari perdagangan, siber teknologi, militer, hingga kesehatan. Penelitian dalam artikel ini bersifat kualitatif di mana analisis konten dilakukan terhadap data yang diperoleh dari dokumen berita, artikel maupun laporan. Dari penelusuran tersebut, dihasilkan bahwa sejumlah fenomena dinamis dalam dunia Islam, seperti normalisasi Arab-Israel, bergabungnya Iran ke SCO, isu etnis muslim Uighur, etnis minoritas Rohingya, penolakan vaksin Tiongkok, hingga pembentukan aliansi pertahanan AUKUS, menunjukkan adanya pengaruh dari rivalitas AS dan Tiongkok. Berdasarkan pendekatan neorealisme, dinamika struktur internasional mempengaruhi perilaku negara-negara muslim dalam mengambil pilihan-pilihan rasional.

Kata Kunci: *Dunia Islam, Neorealisme, Geopolitik, Amerika Serikat, Tiongkok*

Pendahuluan

Satu dekade terakhir, Tiongkok telah tumbuh bergeliat menjadi kekuatan ekonomi, politik dan keamanan baru dalam percaturan politik internasional. Terutama setelah Negeri Tirai Bambu itu mendeklarasikan agenda global ekonominya *One Belt One Road (OBOR)* atau *Belt and Road Initiative (BRI)* pada tahun 2013 (Kurniawan & Faraswacyen L.Gaol, 2021).

Kehadiran proyek BRI dilatarbelakangi krisis ekonomi yang terjadi di Asia pada 1998, disusul 2001, 2008 dan 2011 yang terjadi di Amerika Serikat (AS). Krisis tersebut menyebabkan terjadinya pelambatan pertumbuhan perekonomian dunia, termasuk terhadap pertumbuhan ekonomi Tiongkok (Eslake, 2017). Krisis ekonomi dunia telah memukul perekonomian dan sektor industri negeri berpenduduk lebih dari 1 miliar jiwa tersebut. Situasi itu mendorong Presiden Xi Jinping melakukan terobosan dengan mengeluarkan kebijakan BRI dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan politik di dalam negerinya. Namun ambisi geoekonomi global Tiongkok justru memicu dinamika baru dalam politik internasional. AS mencurigai adanya agenda politik keamanan yang tersembunyi dibalik proyek BRI Tiongkok.

Kecurigaan AS cukup berdasar, sebab bersamaan dengan ambisi besar geoekonomi tersebut, Tiongkok terus memodernisasi militernya. Militer Tiongkok juga semakin agresif di Laut Tiongkok Selatan. Pembentukan aliansi pertahanan AUKUS (Australia, United Kingdom, United States) secara unilateral oleh aliansi AS, Inggris dan Australia di Asia Pasifik menunjukkan kesadaran geopolitik menghadapi kebangkitan Tiongkok di Indo-Pasifik (Delanova, 2021).

Dalam buku putih pertahanan Tiongkok (*White Paper of Defence*) tahun 1998, disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berdampak

kepada peningkatan kapasitas militer dan pertahanan negara. Hal ini yang mendasari semakin kuatnya Tiongkok di percaturan internasional, seperti ingin mengimbangi hegemoni global yang selama ini dimainkan oleh AS dan Eropa (Gazeta, 1998). Investasi dan pembangunan infrastruktur oleh Tiongkok tersebar di koridor-koridor yang dilalui jalur darat (*belt*) dan jalur laut (*road*) perdagangan Tiongkok, terutama di Asia. Tiongkok menduplikasi kerja ekonomi politik kapitalisme seperti yang dilakukan Barat (Eropa dan AS) sejak puluhan tahun lalu di Asia dan Afrika.

Rivalitas perang dagang antara AS dengan Tiongkok, berdampak terhadap geopolitik global, termasuk dunia Islam. Karena negara-negara muslim sebagai mayoritas dunia ketiga, adalah pasar besar yang menjadi sasaran dari agenda BRI Tiongkok (Loh, 2019). Terkait hal itu, Tiongkok semakin memperkuat aliansinya dengan Rusia dan Iran, dua negara yang selama ini seringkali oposisional terhadap kebijakan global AS. Tidak hanya itu, BRI juga dilihat sebagai kerjasama multilateral di tingkat global yang secara strategis melengkapi kerjasama regional yang dibangun Tiongkok di Asia Tengah, yaitu *Shanghai Cooperation Organization* (SCO).

Kampanye Presiden AS Donald Trump ‘*Make America Great Again*’ yang mengoreksi kebijakan Barack Obama berdampak signifikan terhadap meningkatnya eskalasi di Timur Tengah. Donald Trump secara sepihak membatalkan perjanjian nuklir dengan Iran yang dibuat antara Presiden AS Obama dan Presiden Iran Rouhani sebelumnya. Justru unilateralisme itu mendorong Iran semakin mendekat ke SCO. Sementara Eropa terbelah menyikapi kebijakan Donald Trump. Negara-negara SCO yang dipimpin Rusia dan Tiongkok, selalu menempatkan posisi mereka berseberangan dengan keputusan AS yang menempatkan militernya di kawasan Timur Tengah maupun Teluk Persia (Hendrajit, 2019).

Selain Iran, Pakistan adalah negeri muslim yang dikenal memiliki kedekatan dengan Tiongkok (Arbar, 2020). Pakistan adalah anggota *Shanghai Cooperation Organization* (SCO) sejak 2017 (SCO, 2022).

Pakistan membangun hubungan bilateral yang erat dengan Tiongkok sebagai bentuk politik keseimbangan (*balance of power*) terhadap India di Asia Selatan (Putri et al., 2021). Meski demikian, Pakistan dan India sama-sama berada dalam keanggotaan SCO. Investasi Tiongkok juga cukup besar untuk pembangunan infrastruktur di Pakistan (VoAIndonesia, 2019). Bagi Iran, memperkuat aliansi dengan Rusia dan Tiongkok adalah pilihan rasional (*rational choice*) dalam menghadapi unilateralisme hegemoni AS dan Eropa di Timur Tengah (Rufinaldo, 2021). Sehingga di sisi Tiongkok, ada dua negeri muslim yang sama-sama memiliki kapabilitas nuklir. Keduanya masing-masing mewakili entitas Sunni dan Syiah.

Menyikapi aliansi Tiongkok, Rusia dan Iran yang semakin mesra dalam eskalasi di Timur Tengah, membuat Presiden AS Donald Trump melanjutkan langkah kuda dengan mendorong negara-negara kunci di jazirah Arab, seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain, untuk melakukan normalisasi dengan Israel melalui perjanjian kerjasama yang disebut *Abraham Accord*. Motivasi normalisasi Arab-Israel yang muncul ke permukaan memang lebih pada ancaman krisis ekonomi internal masing-masing negara Arab (Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko). Namun secara geopolitik, normalisasi tersebut tidak saja menguatkan ekonomi bagi pihak-pihak terikat perjanjian, tapi juga bagi AS yang memerlukan soliditas lebih besar di Timur Tengah bagi memperkuat hegemoninya terutama menghadapi perkembangan Iran (Wirawan, 2020; Sulistyawati, 2021). Dengan normalisasi tersebut, maka secara *de facto* geopolitik di Timur Tengah negara-negara Arab yang memiliki persahabatan dengan Israel adalah Mesir (1979), Yordania (1994), Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, dan Maroko tahun 2020.

Sementara Arab Saudi sendiri di bawah Pangeran Muhammad bin Salman (MBS), telah melakukan liberalisasi ekonomi dan politik untuk memperkuat kedudukannya di kawasan. Kebijakan MBS tentunya

menguntungkan dan sejalan dengan garis kebijakan AS di Timur Tengah terkait agenda global demokratisasi dan liberalisasi. Arab Saudi memang tidak mengumumkan normalisasi hubungannya dengan Israel, tapi pertemuan MBS dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menlu AS Mike Pompeo di Washington tahun 2020 menunjukkan sinyal yang kuat. Apalagi pertemuan itu juga melahirkan kesepakatan antara Arab Saudi dengan Israel yang berkelanjutan soal Iran, di mana kedua negara menganggap Iran sebagai ancaman utama bagi mereka (Jaramaya, 2020).

Bagi Arab Saudi, ancaman terbesar di kawasan adalah Iran karena faktor ideologis, bukan Israel. Secara geopolitik, normalisasi tersebut dapat dipahami sebagai penguatan hegemoni AS sekaligus reaksioner terhadap semakin menguatnya pengaruh Iran di Timur Tengah (Mohammed al-Ragawi, Mohamed Amin, 2021). Iran pun tidak berhenti di situ. Pada September 2021 lalu, Iran meningkatkan aliansi dengan menyatakan bergabung secara penuh (*full membership*) ke dalam SCO (Güven, 2021). Secara geoekonomi, SCO menjadi landasan penting bagi kesuksesan proyek BRI Tiongkok di Asia (Na-Xi et al., 2019). Dengan bergabung ke dalam SCO, artinya Iran pun siap dengan proyek besar BRI Tiongkok (Kamel 2018). Tapi secara geopolitik, Tiongkok memperoleh keuntungan yang lebih dari keanggotaan penuh Iran untuk memperkuat hegemoni di kawasan. Dengan bergabungnya secara penuh Iran ke dalam SCO, maka separuh peta Asia terkonsolidasi oleh Tiongkok.

Di Asia Tenggara, muslim Rohingya masih mengalami kekerasan dan diskriminasi struktural dari segi ekonomi, sosial, budaya dan politik. Ketika pemerintah demokratik Myanmar membiarkan kekerasan yang dilakukan militernya terhadap etnis Rohingya di wilayah Rakhine pada tahun 2017 lalu (Taylor-Lind, 2017), kecaman dunia internasional mengalir deras. AS pun mengutuk hingga mengeluarkan kebijakan embargo atas Myanmar, yang kemudian diikuti Uni Eropa yang memperpanjang embargo senjata atas Myanmar pada tahun 2018 (Yoseph, 2018). Namun pemerintah Aun

San Su Kyi yang mengklaim demokratis, tetap bergeming. Myanmar mendapat dukungan dari sekutu dekatnya Rusia dan Tiongkok. Wilayah Rakhine diketahui masuk ke dalam koridor pembangunan BRI Tiongkok (Ryack, 2020). Karena itu sangat dipahami sikap dingin Tiongkok terhadap Myanmar.

Metode Penelitian

Dalam rangka menggapai tujuan penelitian, kajian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji makna, pemahaman, fenomena, kejadian, maupun dinamika baik terlibat langsung, dan atau tidak langsung dalam objek yang dikaji. Namun dalam penelitian ini, peneliti tidak terlibat langsung ke dalam objek penelitian. Menurut Creswell (1994), penelitian kualitatif lebih menekankan pada aktifitas peneliti sebagai instrumen kunci karena mereka yang secara mandiri mengumpulkan, memeriksa, dan menafsirkan informasi serta data yang diperolehnya dari berbagai pendekatan di lapangan, baik wawancara atau dokumen kepustakaan.

Fokus penelitian ini pada dampak geopolitik dan keamanan yang ditimbulkan dari konflik AS-Tiongkok pada rentang tahun 2013-2021 terhadap dunia Islam. Untuk menganalisa fokus tersebut, kajian ini sebatas menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan menghimpun informasi dari sumber-sumber primer maupun sekunder seperti buku, jurnal, media massa, dan dokumen-dokumen resmi.

Tinjauan Teori

Realisme Struktural

Dalam pendekatan realisme struktural atau neorealisme, ada dua kata kunci utama dan mendasar yaitu anarki dan struktur sistem internasional. Kedua terminologi ini premis utama dalam rangka menjelaskan perilaku negara, struktur politik, serta agenda utama dalam hubungan internasional. Pendekatan neorealisme merupakan kritik atas asumsi dasar realisme yang berpandangan bahwa sifat dasar manusia (*human nature*) adalah penjelasan atas berbagai fenomena konfliktual dalam hubungan internasional (Mearsheimer, 2013). Bagi kelompok realisme struktural, sifat dasar manusia yang pesimis tidak berkorelasi kepada perilaku negara dalam lingkungan politik internasional. Justru menurut mereka, faktor utama yang mempengaruhi perilaku negara adalah struktur anarki internasional. Keadaan struktur ini memaksa negara untuk bertindak agresif demi mempertahankan kedaulatan dan kepentingan nasional. Persamaan antara realisme dan realisme structural terletak pada anggapan desain struktur internasional yang bersifat anarki (Mearsheimer, 2013).

Secara sederhana, anarki merupakan ketiadaan otoritas tunggal dalam sistem internasional yang berlangsung, yang mengatasi masing-masing aktor. Kondisi ini yang menyebabkan pola interaksi antar-aktor menjadi kompleks, rumit dan cenderung tidak teratur. Hal ini berbeda pada level domestik, dimana institusi negara (dan pemerintahnya) menjadi otoritas tunggal yang menjamin keteraturan (*order*) (Dugis, 2016). Memahami situasi anarki akan lebih mudah jika dikomparasi dengan situasi hubungan internasional di era imperium.

Kekuatan (*power*) baik dalam dalam pandangan realisme klasik maupun realisme struktural atau neorealisme adalah kapabilitas material yang mampu dikontrol oleh negara (Mearsheimer, 2013). Dalam konteks ini, baik realisme structural maupun realisme klasik sama-sama melihat bahwa militer dan ekonomi adalah penentu kualitas kekuatan (*power*) suatu negara. Oleh karena itu, bagi kaum neorealisme, negara yang kuat dan ideal adalah negara yang memiliki kapasitas militer dan ekonomi yang kuat.

Militer dan ekonomi adalah dua unsur utama yang mendeterminasi posisi aktor negara dalam percaturan politik internasional. Neorealisme berangkat dari tradisi filosofis^{4e} yang berbeda dengan realisme klasik. Jika realisme klasik menilai perilaku manusia dan negara yang mempengaruhi struktur internasional, tapi neorealisme atau realisme struktural justru sebaliknya fokus pada struktur internasional yang mempengaruhi perilaku aktor (negara).

Dinamika dalam struktur internasional mendorong aktor negara berperilaku terhadap aktor atau entitas politik lainnya. Pilihan perilaku yang diambil merupakan pilihan rasional (*rational choice*) yang didasarkan pada kondisi kepentingan nasional (*national interest*) masing-masing aktor. Pilihan-pilihan perilaku tersebut seringkali menempatkan aktor negara dalam situasi dilema keamanan (*security dilemma*) ataupun menciptakan politik keseimbangan kekuatan (*balance of power*) terhadap musuh. Dalam hal ini, akan dilihat bagaimana pilihan-pilihan perilaku atau kebijakan negara-negara muslim dalam merespons dinamika konflik AS dan Tiongkok yang mempengaruhi struktur internasional. Perilaku tiap-tiap negara tentunya akan saling berbeda bergantung pada kondisi kepentingan nasional dan geopolitik regional masing-masing.

Persepsi Ancaman

Konsepsi tentang ancaman (*threat*) muncul bersamaan dengan munculnya kajian tentang keamanan (*security*). Setiap negara membangun sistem keamanan masing-masing dalam rangka mempertahankan kedaulatan (*sovereignty*) dan kepentingan nasional (*national interest*) dari kehadiran ancaman yang dipersepsikan akan datang mengancam kedaulatan dan kepentingan nasional dari negara tersebut. Oleh karena itu, ancaman terhadap suatu negara tentunya berkaitan dengan politik luar negeri dari

negara lain. Jika pada masa Perang Dingin, ancaman yang muncul selalu didominasi berasal dari eksternal negara, tapi setelah era tersebut spektrum ancaman justru semakin beragam sifat dan sumbernya, dapat berasal dari domestik maupun global (Anak Agung Banyu Perwita, 2005). Ancaman yang bersumber dari eksternal negara seringkali bersifat tradisional atau militer. Perkembangan globalisasi berpengaruh terhadap keragaman sifat ancaman yang mengancam suatu negara.

Dalam studi keamanan dan strategi, ancaman diartikan sebagai sebuah keadaan di mana individu ataupun kelompok yang memiliki kemampuan ataupun rencana untuk menimbulkan konsekuensi negatif seperti ketakutan terhadap individu atau kelompok lain (Davis, 2000). Dari segi objeknya, ancaman terdiri dari dua kategori, yaitu ancaman terhadap individu, dan ancaman terhadap kolektif (MacKuen, Michael B, Robert S Erikson, 1992). Dalam hal kategori kedua, negara termasuk kepada unsur kolektif. Di sinilah fokus kajian Hubungan Internasional yang melihat ragam bentuk ancaman kolektif, seperti ancaman militer, ekonomi, atau budaya (Rousseau, 2007). Sehingga isu keamanan menjadi jauh lebih komprehensif karena berkaitan dengan aspek-aspek lain seperti ekonomi, sosial-budaya, lingkungan, demokratisasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Konsep persepsi ancaman (*threat perception*) digunakan untuk menganalisa tindakan responsif suatu negara sebagai pengaruh dari tindakan atau kebijakan luar negeri negara lain (Tilman, 1987). Dalam hal ini, Tilman menyebutkan bahwa persepsi ancaman suatu negara terhadap negara lain setidaknya memiliki lima dimensi, yaitu dimensi sejarah, dimensi sosio-budaya, dimensi struktur, dimensi ekonomi, dan dimensi geopolitik-kawasan (Tilman, 1987). Perlu digarisbawahi, bahwa ancaman dan persepsi ancaman adalah dua hal berbeda. Ancaman diasumsikan bersifat riil atau nyata. Sedangkan persepsi ancaman masih bersifat psikologis, bukan ancaman sebenarnya (*real threat*). Artinya, kebijakan suatu negara dapat berpotensi menjadi ancaman baru sebatas isu. Isu tersebut dapat menjadi

ancaman nyata jika benar-benar memberi pengaruh kepada negara lain, atau dinyatakan secara verbal oleh negara bersangkutan bahwa kebijakannya ditujukan kepada negara tertentu. Dalam politik internasional yang anarki, akumulasi perkembangan dari kekuatan militer dan pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dipersepsikan sebagai ancaman oleh negara lain (Stein, 2017). Seperti dalam hal ini, kebangkitan Tiongkok dipersepsikan sebagai ancaman bagi kelangsungan hegemoni AS. Begitupun unilateralisme AS dipandang sebagai ancaman bagi Tiongkok dalam mencapai visi global ekonomi negeri Tirai Bambu tersebut.

Pembahasan

Rivalitas AS-Tiongkok

Kebangkitan Tiongkok sebagai aktor politik-ekonomi global dalam satu dekade terakhir berdampak terhadap perubahan dinamika sistem internasional. Kebangkitan ekonomi-politik dan keamanan Tiongkok dirasakan terutama sejak Tiongkok mengumumkan secara resmi agenda ekonomi globalnya yang disebut *Belt and Road Initiative* (BRI) disertai dengan pembentukan *Asian Infrastructure and Investment Bank* (AIIB) tahun 2013. Inisiatif global politik-ekonomi Tiongkok tersebut mendapatkan tantangan dari Barat. Tiga tahun kemudian, tahun 2016 AS bersama sejumlah negara seperti Australia, Kanada, Jepang, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Vietnam, Chili, Meksiko, Selandia Baru, dan Peru mengumumkan blok perdagangan lintas pasifik yang disebut *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Namun setahun kemudian, Presiden AS terpilih Donald Trump mengumumkan pengunduran diri negaranya dari kesepakatan TPP. Melalui kampanye '*Make America Great Again*', Trump menilai kesepakatan itu tidak menguntungkan AS. Trump justru melihat AS

mengalami banyak kerugian ekonomi akibat gelombang ekonomi yang dilancarkan Tiongkok. AS harus fokus pada ‘serangan’ ekonomi global yang dilancarkan Tiongkok. Salah satunya tuduhan AS atas Tiongkok adalah tutupnya 60 ribu pabrik AS yang beroperasi secara global sejak Tiongkok bergabung ke WTO tahun 2001 (BBC, 2019).

Perang dagang antara AS era Donald Trump dengan Tiongkok era Xi Jinping tak terhindarkan. Perang Dagang ini menjalar menjadi ‘Perang Dingin’ baru yang merambah kepada isu lain mulai dari politik, pertahanan, budaya, hingga teknologi. Mulai dari kawasan Pasifik, Asia Tenggara (Laut Tiongkok Selatan), Asia Timur (Taiwan), hingga ke Timur Tengah. Di kawasan-kawasan ini, Tiongkok telah mengembangkan kekuatan militer dan strategisnya dalam 20 tahun terakhir.

Pengaruh Terhadap Dunia Islam

Dilema Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Istilah dunia Islam merupakan istilah atau frasa yang digunakan untuk merujuk kepada kumpulan para individu pemeluk agama Islam yang tersebar di seluruh dunia. Sebagai salah satu agama terbesar di dunia, Islam memiliki banyak pemeluk yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Hal ini menimbulkan sebuah gagasan mengenai persatuan muslim seluruh dunia (Abbas, 2012).

Pasca Perang Dingin, negara-negara Muslim membangun aliansi dengan negara adidaya AS sesuai dengan kecenderungan khusus mereka yang terkadang bergoyang atau menjadi tidak stabil. Pilihan rasional (*rational choice*) tiap negara muslim berbeda bergantung kepada sejarah nasionalisme dan kepentingan nasional (*national interest*) masing-masing. Namun setelah peristiwa serangan terorisme tahun 2001, hubungan antara dunia Islam dan Barat menjadi goyah (Moniruzzaman, 2013). Sebagian negara muslim seperti Pakistan yang paling terdampak dari kampanye ‘*Global War on Terror*’ yang dilancarkan AS, memilih membangun

kedekatan dengan Tiongkok. Tekanan geopolitik global mendorong Pakistan mengambil tindakan *realisme* dengan menjajaki bergabung ke dalam SCO tahun 2015, dan diterima penuh sebagai anggota tahun 2017 (SCO, 2022). Sementara negara muslim lainnya seperti Arab Saudi, Mesir, Malaysia hingga Indonesia tidak bisa terhindar dari mengikuti irama tabuhan gendang “*Global War on Terror*” AS.

Secara spesifik, Moniruzzaman (2013) menyebutkan bahwa dunia Islam mencakup 47 negara mayoritas Muslim di dunia yang terbagi dalam kluster regional seperti Asia Selatan dan Tenggara (Afghanistan, Bangladesh, Brunei, Maladewa, Malaysia, Indonesia, Pakistan); Asia Tengah (Azerbaijan, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan); Timur Tengah (Bahrain, Iran, Irak, Yordania, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Arab Saudi, Suriah, Turki, UEA, Yaman); Afrika Utara (Aljazair, Djibouti, Mesir, Eritrea, Libya, Maroko, Tunisia); Barat dan Afrika Sub-Sahara (Benin, Burkina Faso, Chad, Komoro, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leon, Somalia, Sudan). Secara keorganisasian, Organisasi Kerjasama Islam (*Organization of Islamic Cooperation/OIC*) merepresentasikan dunia Islam (*Islamic World*).

Konflik AS dengan Tiongkok mendorong organisasi beranggotakan 57 negara muslim tersebut terjebak ke dalam dilema keamanan internasional (*security dilemma*). Untuk isu Palestina misalnya, relatif sedikit friksi paradigmatis di antara anggota OKI. Isu Palestina secara umum mampu menyatukan suara politik dunia Islam. Karena memang organisasi ini didirikan berdasarkan motivasi persatuan dan pembelaan yang kuat dari negara-negara muslim menyikapi pembakaran Masjid Al-aqsha di Palestina oleh tentara Israel pada tahun 1969 (OIC, 2022). Namun ketika isu dunia Islam bergeser keluar dari Palestina, dunia Islam cenderung terfragmentasi oleh kepentingan nasional masing-masing anggota.

Dalam isu etnis Uighur, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang diketahui sebagai sekutu dekat AS di Timur Tengah, justru membela Tiongkok (Safoora, 2019). Pembelaan tersebut didasarkan kepada pandangan bahwa *re-education camp* bagi etnis Uighur oleh pemerintah Tiongkok merupakan bentuk dari upaya Tiongkok dalam mengatasi isu permasalahan terorisme, ekstrimisme dan separatisme yang juga merupakan hal-hal yang dapat menjadi ancaman bagi seluruh negara di dunia (Jamali, 2020). Meskipun pada isu tersebut, AS, Eropa dan PBB menyerukan penyelidikan HAM terhadap Tiongkok. AS mendesak agar dunia menjatuhkan sanksi embargo terhadap Tiongkok. Bahkan media-media AS secara masif mempropagandakan pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur. Tapi Arab Saudi, UEA dan Qatar bergeming tetap memberikan dukungan pada Tiongkok (Safoora, 2019). Kencangnya serangan propaganda AS terhadap Tiongkok dalam isu Uighur sebagai imbas ‘Perang Dingin’ yang dimulai dari perang dagang.

Sikap dilematis OKI dan anggotanya yang berbeda tersebut dipengaruhi dinamika geopolitik internasional. Namun berbeda seperti dalam konflik yang terjadi di Filipina Selatan, OKI berhasil membawa pemerintah Filipina dan MNLF (*Moro National Liberation Front*) untuk melakukan mediasi yang berujung pada penandatanganan perjanjian damai. OKI juga berkoordinasi dengan IDB (*Islamic Development Bank*) dalam memberikan donasi bagi perbaikan infrastruktur di wilayah pasca konflik. Pada kasus di Thailand Selatan, OKI berupaya keras menghilangkan *stereotype* dan kesalahpahaman yang kerap menjadi hambatan menuju negosiasi dan dialog. Pada kasus Somalia, OKI juga berhasil pada upaya perjanjian damai di Djibouti tahun 2008 dan memberikan bantuan finansial untuk rekonstruksi pasca konflik. Begitu pun di Iraq, OKI berupaya mempertemukan kelompok Sunni dan Syiah agar berekonsiliasi. Upaya ini berujung pada penandatanganan Deklarasi Mekkah 2006 (Andika, 2020).

Sikap dilema OKI yang demikian mendorong mantan Perdana Menteri Malaysia Mahatir Muhammad menginisiasi pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Muslim di Malaysia pada Desember 2019. Mahatir mengundang seluruh negara muslim yang tergabung dalam OKI. Namun Arab Saudi yang menjadi sekretariat OKI menolak pertemuan tersebut serta menyeru anggota OKI untuk tidak menghadiri undangan Mahatir. Bahkan menyebut pertemuan tersebut sebagai upaya memperlemah dan memecah OKI (Ezra Sihite & Adrianjara, 2019). Dengan kata lain pertemuan tersebut dianggap sebagai OKI tandingan.

Antara Normalisasi Arab-Israel dan Bergabungnya Iran ke SCO

Apakah normalisasi Arab-Israel yang dimotori AS berkaitan dengan rivalitasnya terhadap Tiongkok? Apakah normalisasi tersebut sebagai upaya AS memperkuat hegemoni di Timur Tengah menghadapi semakin kuatnya aliansi Tiongkok, Iran dan Rusia?

Pada Agustus 2020, Uni Emirat Arab dan Israel menandatangani perjanjian yang diinisiasi AS dengan nama '*Abraham Accords Peace Agreement*'. *Abraham Accords* merupakan deklarasi formal mengenai normalisasi diplomatik dan ekonomi antara kedua negara. Kesepakatan ini dapat secara signifikan mempengaruhi masa depan konflik Arab-Israel dan hubungan strategis di kawasan yang lebih luas (IISS, 2020). Penandatanganan *Abraham Accords* antara UEA dan Israel diproyeksikan menjadi awal era untuk kedamaian Timur Tengah (Güney & Korkmaz, 2021). Poin penting pembahasannya adalah bahwa UEA dan Israel memiliki kepentingan bersama dalam menggagalkan rencana nuklir Iran yang mengancam keamanan kawasan dan UEA tertarik untuk meningkatkan hubungan dengan Israel (Podeh, 2018).

Selain UEA, negara Arab lain yang menyusuri jejak sama adalah Bahrain dan Maroko. Bahrain mengikuti jejak UEA menormalisasi hubungan dengan Israel pada September 2020, sementara Maroko pada Desember 2020. Bahrain menjadi negara Arab keempat dan Maroko negara kelima yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel setelah Mesir pada 1979, Yordania pada 1994, dan UEA pada Agustus 2020 (Jaramaya, 2020).

Sementara itu, Arab Saudi memang tidak mengumumkan normalisasi hubungannya dengan Israel, tapi pertemuan MBS dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menlu AS Mike Pompeo di Washington pada November 2020 cukup memberi sinyal kuat kebersamaan kedua negara. Apalagi pertemuan itu juga melahirkan kesepakatan antara Arab Saudi dengan Israel yang berkelanjutan soal Iran, di mana kedua negara itu sama-sama menganggap Iran sebagai ancaman utama mereka (Sulistiyawati, 2021).

Geliat strategi geopolitik yang dilakukan AS di Timur Tengah menjadi ancaman bagi Iran dan aliansinya di Iraq, Suriah dan Yaman. Pemimpin spiritual Iran Ayatollah Ali Khamenei menyebut negara-negara Arab "telah berdosa" menormalisasi hubungan dengan Israel tahun lalu, dan harus membatalkan kebijakan tersebut (DeutscheWelle, 2021). Normalisasi dilakukan di tengah Iran sedang menegosiasikan pemulihan Perjanjian Nuklir 2015. Tapi upaya itu dihalang-halangi Israel yang selalu melobi AS, Rusia dan Eropa agar tidak melanjutkan perundingan nuklir Iran (DeutscheWelle, 2021).

Timur Tengah di tengah gejolak politik keamanan yang tidak menentu, ditambah krisis energi minyak bumi yang semakin akut, mendorong penguatan normalisasi. Situasi ini juga pada akhirnya mendorong Iran untuk mempercepat keanggotaan dari sebatas peninjau (*observer*) menjadi keanggotaan penuh di SCO pada Oktober 2021. Presiden Ebrahim Raisi menyebut keanggotaan penuh Iran ke dalam SCO

sebagai kesuksesan diplomatik yang memiliki dua dimensi, pertama dimensi geoekonomi yang menghubungkan Iran ke dalam kelompok ekonomi-infrastruktur Asia dengan sumber dayanya yang melimpah. Kedua, dimensi geopolitik sebagai bentuk penolakan terhadap unilateralisme AS dan menyeru perlawanan terhadap segala bentuk sanksi global dari unilateralisme (Motamedi, 2021).

Peneliti dari *German Institute for International and Security Affairs* (SWP), Hamidreza Azizi melihat bergabungnya Iran ke dalam SCO pimpinan Tiongkok sebagai 'Pertunjukan kekuatan-kekuatan besar non-Barat dan anti-AS'. Aliansi ini tentunya sebagai tantangan sekaligus ancaman terhadap hegemoni AS (Motamedi, 2021). Meskipun Arab Saudi, Qatar dan Mesir diterima sebagai mitra dialog baru, namun posisi ketiga negara tersebut di SCO tidak terlalu signifikan. Bahkan dalam pidatonya pada peringatan hari jadi SCO ke-20, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyinggung soal ketidak-adilan internasional seakan menunjuk kepada hegemoni AS. Xi Jinping meyakini bahwa keluarga besar SCO (*growing SCO Family*) akan mampu memainkan peran sebagai "pembangun perdamaian dunia (*builders of world peace*), kontributor bagi pembangunan global (*contributors to global development*), dan pembela tatanan internasional (*defenders of the international order*)". (CGTN, 2021a)

Arab Saudi Menolak Vaksin Tiongkok

Bagaimana dengan penolakan Arab Saudi terhadap penggunaan vaksin Sinovac dan Sinopharm dari Tiongkok? Bukan hanya di dalam negeri, kerajaan Arab Saudi juga tidak mengakui kedatangan warga negara asing yang divaksin menggunakan Sinovac.

Sebagai sekutu terkuat AS di Timur Tengah, Arab Saudi menolak penggunaan vaksin Sinovac keluaran farmasi Tiongkok (Abueish, 2021).

Arab Saudi juga tidak mengakui vaksin Sputnik dari Rusia. Kerajaan Arab Saudi melarang masuk warga negara asing yang disuntik vaksin Sinovac. Kerajaan hanya memperbolehkan penggunaan vaksin Pfizer, Moderna, Astrazeneca dan Johnson & Johnson. Raja Salman bin Abdul Aziz bahkan menyatakan akan menghukum warganya yang melakukan bepergian ke beberapa negara seperti Afghanistan, Argentina, Brasil, Mesir, Ethiopia, India, Lebanon, Pakistan, Afrika Selatan, Turki, Vietnam, dan Uni Emirat Arab, termasuk Indonesia (ArabNews, 2021). Diketahui, sebagian besar negara tersebut adalah pengguna vaksin Sinovac dalam pengendalian pandemi Covid-19. Tapi Uni Emirat Arab sangat terbuka dengan penggunaan vaksin Sinopharm dari Tiongkok (MOHAP, 2020). Tiongkok memanfaatkan jaringan BRI sebagai jalur distribusi global vaksin Sinovac dan Sinopharm melalui kolaborasi global dibawah *World Health Organization* (WHO), COVAX. Kebijakan yang diterapkan Arab Saudi berlaku juga pada kedatangan haji dan umrah. Pada sesi haji 2020 dan 2021, bahkan Arab Saudi hanya memberlakukan kedatangan haji lokal.

Afghanistan Mendekat ke Tiongkok

Keluarnya AS dari Afghanistan pada akhir Agustus 2021 lalu, menurut banyak pakar, dianggap sebagai keputusan luar negeri yang fatal di kawasan. Keputusan itu dilakukan AS ditengah ‘Perang Dingin’ yang sedang berlangsung antara negeri Paman Sam tersebut dengan Tiongkok. Karena Afghanistan baru di bawah Taliban akan sangat mungkin lebih dekat ke Tiongkok, negara besar yang dianggap tidak pernah ‘menjajah’ Afghanistan.

Taliban kembali ke tampuk kekuasaan Afghanistan tanpa perlawanan berarti dari pemerintahan Hamid Karzai. Dalam waktu sepekan, milisi Taliban berhasil menguasai seluruh provinsi dan membentuk Emirat Islami Afghanistan. Kembalinya kelompok ini dengan mudah menguasai

Afghanistan menjadi kejutan bagi dunia. Karena AS selama 20 tahun tidak saja menguasai Afghanistan, tapi juga membentuk pemerintahan dan mempersenjatai militer negeri yang dijuluki sebagai ‘kuburan para penguasa’ (*graveyard of empires*) tersebut dengan alustista canggih.

AS pun dan sejumlah negara Barat menjatuhkan sanksi kepada Taliban. Namun yang menarik dari perubahan geopolitik di Afghanistan adalah keputusan para pemimpin Taliban untuk terbuka terhadap dunia internasional, lebih demokratis dari episode Taliban sebelumnya, serta melakukan langkah zig-zag untuk mendapat pengakuan dan dana dari dunia internasional. Salah satunya dengan mendekati Tiongkok.

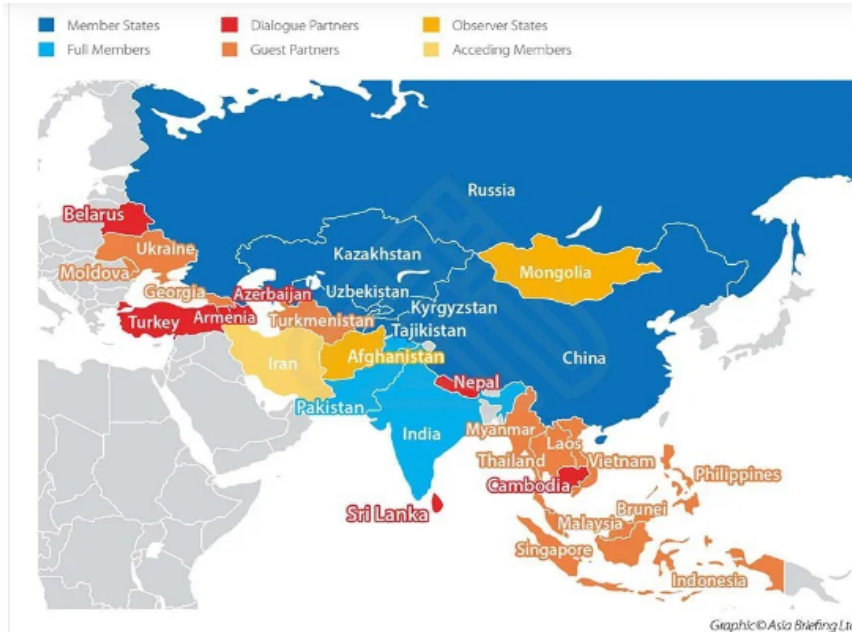
Tiongkok melakukan pendekatan intensif kepada Afghanistan di bawah Taliban melalui beberapa pertemuan bilateral dan pengiriman bantuan kemanusiaan. Bagi Tiongkok, kehadiran ‘Afghanistan baru’ di bawah Taliban menjadi peluang sekaligus ancaman. Sebagai peluang karena tentunya Afghanistan di bawah Taliban tidak akan condong kepada AS dalam pembangunan kembali ekonominya yang jatuh akibat perang berkepanjangan. Kondisi ini menjadi peluang besar bagi agenda BRI Tiongkok di kawasan.

Selain itu, secara geografis, Afghanistan bersebelahan dengan Tiongkok. Negeri itu memiliki sumber daya alam mineral yang melimpah. Pada 2010, pejabat militer dan ahli geologi AS mengungkapkan bahwa Afghanistan memiliki cadangan mineral hampir US\$ 1 triliun atau sekitar Rp 14 ribu triliun (Cahyani, 2021). Tiongkok juga membutuhkan Taliban terkait persoalan etnis Uighur. Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, bertemu dengan perwakilan Taliban di Tianjin. Wang minta Taliban membantu melawan kelompok ekstremis Uighur di Xinjiang, *East Turkestan Islamic Movement* (ETIM). Kelompok yang dicap teroris oleh Tiongkok ini, bertekad menjadikan Xinjiang sebagai negara Islam.

Kelompok tersebut juga dianggap teroris oleh PBB, Uni Eropa, dan beberapa negara lain secara khusus, seperti Malaysia, Pakistan, Rusia, Turki, Inggris, dan Uni Emirat Arab (Cahyani, 2021). Taliban juga berjanji tidak membiarkan wilayah Afghanistan digunakan "melawan siapa pun atau negara mana pun di dunia" (CGTN, 2021a).

Pendekatan timbal-balik rezim Afghanistan ke Tiongkok dan Rusia semakin memperkokoh peta aliansi yang terbentang dari Asia Selatan hingga Asia Tengah dan Rusia, seakan membelah benua. Pendekatan baik dilakukan Afghanistan maupun Tiongkok terjadi akibat pertemuan dua kepentingan nasional yang didorong oleh dinamika struktur internasional yang anarki. Dengan merapatnya Afghanistan kepada Tiongkok dan Rusia membuat peta kerjasama SCO semakin besar di satu sisi, dan di sisi lain membuat kekuatan aliansi AS di Timur Tengah terjepit.

Gambar: Peta negara-negara SCO (Devonshire-Ellis, 2020)



AUKUS di ‘Halaman Belakang’ Indonesia

Di tengah rivalitasnya dengan Tiongkok di Pasifik yang terus memanas, Presiden AS Joe Biden secara virtual bersama dengan Perdana Menteri Australia Scott Morrison dan PM Inggris Boris Johnson mendeklarasikan kerjasama keamanan pertahanan yang dinamai AUKUS (Australia, *United Kingdom, United States*) pada medio September 2021. Pembentukan aliansi keamanan tersebut sebagai upaya pertahanan bersama menghadapi (persepsi) ancaman kebangkitan Tiongkok di Asia Pasifik (Wintour, 2021; Alexander Ward, 2021; Yang, 2021). Poin kerjasama pertahanan tersebut untuk berbagi informasi dan pengetahuan di bidang teknologi utama seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), siber, kuantum, sistem bawah air, dan kemampuan serangan jarak jauh (*long-range strike capabilities*), termasuk pengembangan kapal selam bertenaga nuklir (Alexander Ward, 2021).

Sangat layak jika Indonesia negara paling bereaksi terhadap pembentukan aliansi pertahanan tersebut. Karena aliansi itu dideklarasikan di ‘halaman belakang’ Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar dunia. Dari perspektif Indonesia, aliansi tersebut dapat dilihat sebagai potensi ancaman (*threat perception*) terhadap stabilitas keamanan regional (Singh, 2021), dan tentunya keamanan nasional Indonesia. Karena posisi Indonesia di dekat Laut Tiongkok Selatan juga akan menjadi lalu lintas kapal selam bertenaga nuklir milik Australia (KoranSINDO, 2021).

Di sela-sela pertemuan G-20 di Italia pada 30-31 Oktober 2021, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyatakan dengan tegas keprihatinan pembentukan AUKUS yang berdampak tidak saja terhadap keamanan Indonesia, tapi juga ASEAN (CGTN, 2021b). Untuk menenangkan keprihatinan tersebut, Perdana Menteri Scott Morrison menghubungi Presiden Joko Widodo dan menegaskan Australia akan tetap

menjalankan kewajibannya menurut perjanjian non-proliferasi nuklir (NPT). Morrison beralasan kemitraan keamanan Australia-Inggris-Amerika Serikat (AUKUS) yang baru justru akan berkontribusi pada stabilitas dan "keseimbangan strategis" di kawasan (Utomo, 2021). Tapi bagaimanapun 'keseimbangan strategis' dengan kehadiran AUKUS adalah untuk mengimbangi perkembangan kekuatan dan pengaruh Tiongkok di Indo-Pasifik. Dua titik eskalasi tinggi antara AS dengan Tiongkok terletak di Taiwan dan Laut Tiongkok Selatan (Yang, 2021). Dinamika ini tentunya membuat posisi Indonesia terhimpit oleh dua kekuatan besar AS dan Tiongkok. Rivalitas tersebut juga berdampak kepada eskalasi politik dalam negeri Indonesia yang dinamis.

Efek Domino Perang Ukraina

Serangan Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022 membuat dinamika konflik antara AS dan Tiongkok semakin rumit, karena Tiongkok merupakan sekutu dekat Rusia. Kedua negara tergabung ke dalam *Collective Security Treaty Organization (CSTO)*, organisasi keamanan kolektif yang disebut-sebut sebagai tandingan NATO (*North Atlantik Treaty Organization*) pimpinan AS. Tiongkok selalu memainkan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB (*United Nations Security Council*) atas setiap keputusan organisasi dunia tersebut yang memberi sanksi terhadap Rusia. Perang di Ukraina berefek domino di Laut Tiongkok Selatan, Taiwan dan Semenanjung Korea yang makin memanas, di mana pada ketiga kawasan ini Tiongkok menjadi aktor utama dalam eskalasi.

Fenomena yang menarik dari Perang Ukraina adalah kecenderungan negara-negara muslim dalam mendukung Rusia. Pada Sidang Majelis Umum PBB yang digelar pada 7 April 2022 dalam menyikapi pelanggaran HAM dilakukan Rusia terhadap Ukraina, sebanyak 93 negara mendukung resolusi. Tapi sebanyak 24 negara menentang dan 58 negara memilih

abstain. Negara-negara yang abstain dan menolak resolusi PBB didominasi oleh negara-negara Islam. Hanya Turki dan Libya yang memberikan dukungan terhadap resolusi PBB tentang pemberian sanksi kepada Rusia (Pristiandaru, 2022). Pemungutan suara tersebut juga mencopot Rusia dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB (Pristiandaru, 2022). Dukungan terselubung tersebut banyak dari negara-negara Muslim di Asia dan Afrika. Simpati untuk Rusia di Afrika berakar pada 1950-an dan 60-an, ketika Kremlin mendukung gerakan anti-imperialis dan anti-kolonial dan membantu perang melawan apartheid (Reditya, 2022). Sementara bagi Indonesia, hubungan dekatnya dengan Rusia telah terbangun cukup lama sejak era Soekarno. Rusia berperang penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia pada dua dasawarsa pertama setelah proklamasi kemerdekaan 1945. Dukungan terhadap Rusia dari masyarakat muslim Indonesia tergambar di berbagai platform digital. Dukungan ini sebagai sentiment anti-amerikanisme karena agenda terorisme Paman Sam dan banyak yang mengkaitkan Perang Ukraina sebagai gerbang Perang Dunia III di akhir zaman (Sorongan, 2022).

Kesimpulan

Rivalitas antara AS dan Tiongkok memanas terutama sejak masa pemerintahan Presiden AS Donald Trump (2017) dan Presiden Tiongkok Xi Jinping (2013). Perang dagang dilancarkan AS sebagai rekasi terhadap agenda ekonomi-politik global Tiongkok melalui proyek *Belt and Road Initiative* (BRI). Dari perang dagang ini rivalitas meluas ke bidang militer, siber, hingga kesehatan. Seperti memanasnya ketegangan di Laut Tiongkok Selatan, ketegangan di Taiwan dan semenanjung Korea, tuduhan pencurian hak cipta, saling serang siber, hingga pembentukan aliansi pertahanan di Pasifik.

Rivalitas kedua negara tidak bisa dihindari turut berdampak kepada dunia Islam. Negara-negara muslim harus mengambil pilihan-pilihan rasional dalam menyikapi dampak dari rivalitas. Karena kedua negara, baik AS maupun Tiongkok memiliki hubungan kontekstual dengan masing-masing negara-negara muslim. Di Timur Tengah, AS terlihat mengokohkan hegemoninya melalui normalisasi Arab – Israel pada tahun 2020. Pengokohan itu dalam rangka menghadapi pengaruh Iran yang makin kuat. Iran pun mengambil langkah dengan mengambil keanggotaan penuh di *Shanghai Cooperation Organization* (SCO) pada September 2021. Dengan keanggotaan penuh Iran, SCO menjadi organisasi kerjasama multilateral ekonomi, perdagangan dan perbatasan terbesar di Asia secara teritorial. Di sisi lain, SCO menerima Arab Saudi, Qatar dan UEA sebagai mitra dialog SCO, sebuah strategi geopolitik yang dimainkan Tiongkok dan Rusia.

Pada saat pandemi Covid-19 melanda dunia, AS menyerang Tiongkok sebagai pihak yang paling harus bertanggung jawab. AS pun keluar dari *World Health Organization* (WHO) yang ditudingnya berada dibawah kendali Tiongkok. Jaringan BRI yang sudah terbentuk dimanfaatkan Tiongkok sebagai jalur distribusi vaksin. Namun vaksin buatan Tiongkok ditolak AS dan sejumlah negara sekutunya, termasuk Arab Saudi. Tapi pada isu etnis muslim Uighur, beberapa negara muslim seperti Arab Saudi, Turki dan Malaysia justru mendukung kebijakan Tiongkok. Tiongkok menolak desakan AS dan Barat untuk dilakukan investigasi internasional atas dugaan pelanggaran HAM pada etnis Uighur. Tapi sikap berbeda kembali terlihat pada isu muslim Rohingya di Myanmar. Negara-negara muslim berada segaris dengan AS mengecam keras Myanmar yang mendapat dukungan dari Tiongkok dan Rusia.

Terakhir, Indonesia sebagai negeri muslim terbesar di dunia menolak pembentukan aliansi pertahanan unilateral yang dibentuk di Australia, Inggris (*United Kingdom*) dan AS (*United States*) bernama AUKUS. Penolakan keras dinyatakan Jakarta, karena aliansi yang ditujukan sebagai

containment terhadap Tiongkok tersebut dibangun di ‘halaman belakang’ geopolitik Indonesia.

Acknowledgement

Penulisan penelitian ini mendapat bantuan dana dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Al-azhar Indonesia melalui skema pembiayaan internal Stimulus Research Grant periode kesatu tahun 2022.

Daftar Pustaka

- Abbas, M. (2012). Globalization and the Muslim World. *Journal of Islam in Asia* (E-ISSN: 2289-8077), 8(June), 275–295. <https://doi.org/10.31436/jia.v8i0.261>
- Abueish, T. (2021). *Saudi Arabia’s health ministry denies approving Sinopharm, Sinovac COVID-19 vaccines.* <https://english.alarabiya.net/coronavirus/2021/08/08/Saudi-Arabia-s-health-ministry-denies-rumors-of-COVID-19-vaccine-deaths>
- Alexander Ward, P. M. (2021). *Biden announces joint deal with U.K. and Australia to counter China.* <https://www.politico.com/news/2021/09/15/biden-deal-uk-australia-defense-tech-sharing-511877>
- Anak Agung Banyu Perwita, Y. M. Y. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional.* Remaja Rosdakarya.
- Andika, M. T. (2020). *Sikap Lunak OKI terhadap China dan Isu Pelanggaran HAM Muslim Uighur.* 49.

<https://www.researchgate.net/publication/342151201>

ArabNews. (2021). *Saudi Arabia to lift entry ban from six countries, including Egypt, Pakistan and India | Arab News*.
<https://www.arabnews.com/node/1975446/saudi-arabia>

Arbar, T. F. (2020). *Negara Muslim Ini Dukung China di Laut China Selatan, Kenapa?* <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201203074054-4-206472/negara-muslim-ini-dukung-china-di-laut-china-selatan-kenapa>

BBC. (2019). *Trump menuntut keadilan terkait hilangnya 60.000 pabrik AS sejak China masuk WTO - BBC News Indonesia*. BBC.
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49816664>

Cahyani, D. R. (2021). *5 Alasan China Mesra dengan Taliban, dari Soal Uighur Hingga Jalur OBOR -* https://dunia.tempo.co/read/1504725/5-alasan-china-mesra-dengan-taliban-dari-soal-uighur-hingga-jalur-obor?page_num=2

CGTN. (2021a). *China calls for solidarity among SCO members as the bloc turns 20 - CGTN*. <https://news.cgtn.com/news/2021-09-17/Xi-Jinping-addresses-SCO-meeting-via-video-link-13D3zqRd34k/index.html>

CGTN. (2021b). *Chinese, Indonesian FMs concerned over AUKUS nuclear sub deal*. <https://news.cgtn.com/news/2021-10-30/Chinese-Indonesia-FMs-concerned-over-AUKUS-nuclear-sub-deal-14M5H3v4Ve8/index.html>

Davis, J. W. (2000). *Threats and promises: The pursuit of international influence*. Johns Hopkins University Press.

Delanova, M. O. (2021). *Dampak Pakta Pertahanan Trilateral Aukus Terhadap Kondisi Regional Indo-Pasifik*. *Jurnal Dinamika Global*, 6(02), 259–285. <https://doi.org/10.36859/jdg.v6i2.408>

DeutscheWelle. (2021). *Ayatollah Khamenei Desak Dunia Arab Batalkan Normalisasi Dengan Israel*. <https://www.dw.com/id/imam-khamenei->

desak-dunia-arab-batalkan-normalisasi-israel/a-59619139

Devonshire-Ellis, C. (2020). *Shanghai Cooperation Organisation Moscow Summit Implies A New Eastern Bloc - Russia Briefing News*. Russia Breafing. <https://www.russia-briefing.com/news/russia-the-pragmatic-dealmaker-as-shanghai-cooperation-organisation-moscow-summit-implies-a-new-eastern-bloc.html/>

Dugis, V. (2016). *Teori Hubungan Internasional; Perspektif-Perspektif Klasik*. www.csgsunair.org

Eslake, S. (2017). *China's " Belt and Road Initiative " and Its Implications for Global Development*. 6(June), 1–52. <https://doi.org/10.22679/avs.2021.6.1.004>

Ezra Sihite, & Adrianjara, D. (2019). *KTT Kuala Lumpur Dicap Tandingan OKI, Mahathir Angkat Bicara*. <https://www.viva.co.id/amp/arsip/1252371-ktt-kuala-lumpur-dicap-tandingan-oki-mahathir-angkat-bicara>

Gazeta, F. N. (1998). *Chinese Defense White Paper 1998*. 1998(May), 1998.

Güney, N. A., & Korkmaz, V. (2021). A new alliance axis in the eastern mediterranean cold war: What the abraham accords mean for mediterranean geopolitics and turkey. *Insight Turkey*, 23(1), 61–76. <https://doi.org/10.25253/99.2021231.6>

Güven, A. (2021). *Iran's Membership of Shanghai Cooperation Organization: Expectations and Possible Scenarios - İRAM Center | Center for Iranian Studies in Ankara*. <https://iramcenter.org/en/iran-membership-of-shanghai-cooperation-organization-expectations-and-possible-scenarios/>

Hendrajit. (2019). *Bergabungnya Iran Dengan SCO, Inspirasi Terciptanya Aliansi Geopolitik Eropa-Asia*. <https://theglobal-99>

review.com/bergabungnya-iran-dengan-sco-inspirasi-terciptanya-
aliansi-geopolitik-eropa-asia/

IISS. (2020). *The Abraham Accords: Israel–Gulf Arab normalisation*.

J W Creswell. (1994). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. Sage Publication.

Jamali, M. Z. (2020). AMNESTY INTERNASIONAL DAN ORGANISASI KERJASAMA ISLAM DALAM MEMANDANG KONFLIK ETNIS MUSLIM UIGHUR DI CHINA. *Jurnal PIR*, 5, 81–94.

Jaramaya, R. (2020). *Bahrain: Normalisasi dengan Israel Lindungi Kepentingan Negara*. Republika. <https://republika.co.id/berita/qgp0x8377/bahrain-normalisasi-dengan-israel-lindungi-kepentingan-nega>

KoranSINDO. (2021). *Indonesia di Persimpangan Aukus*. <https://nasional.sindonews.com/read/549740/14/indonesia-di-persimpangan-aukus-1632456554>

Kurniawan, Y., & Faraswacyen L.Gaol, D. (2021). Diplomasi Ekonomi Tiongkok melalui Belt and Road Initiative (BRI) di Asia Tenggara (2013 – 2018). *Balcony*, 5(1), 1–10. <https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/balcony/article/view/234>

Loh, P. Y. (2019). *The power of pragmatism - China's belt and road to the Islamic world*. <https://kontinentalist.com/stories/the-power-of-pragmatism-chinas-belt-and-road-to-the-islamic-world>

MacKuen, Michael B, Robert S Erikson, J. A. S. (1992). Peasants or bankers? The American electorate and the US economy. *American Journal of Political Science*, 86(3), 597–611. <https://doi.org/10.2307/1964124>

Mearsheimer, J. J. (2013). Structural Realism. In et al Tim Dunne (Ed.), *International Relations Theories: Discipline and Diversity* (3rd ed.). Oxford University Press.

- Mohammed al-Ragawi, Mohamed Amin, and M. A. (2021). *How US bribed Arab states to normalize ties with Israel*. <https://www.aa.com.tr/en/politics/how-us-bribed-arab-states-to-normalize-ties-with-israel/2108054>
- MOHAP. (2020). *Vaccines against COVID-19 in the UAE - The Official Portal of the UAE Government*. <https://u.ae/en/information-and-services/justice-safety-and-the-law/handling-the-covid-19-outbreak/vaccines-against-covid-19-in-the-uae>
- Moniruzzaman, M. (2013). The Rise of China and Its Implications for the Muslim World. In *Journal of Economic Cooperation and Development* (Vol. 34).
- Motamedi, M. (2021). *What Iran's membership of Shanghai Cooperation Organisation means | News | Al Jazeera*. <https://www.aljazeera.com/news/2021/9/19/iran-shanghai-cooperation-organisation>
- Na-Xi, L., Meng-Fang, H., & Shan-Bing, L. (2019). How the Belt and Road Initiative Can Help Strengthen the Role of the SCO and Deepen China's Cooperation with Russia and the Countries of Central Asia. *India Quarterly*, 75(1), 56–68. <https://doi.org/10.1177/0974928418821484>
- OIC. (2022). *Organisation of Islamid Cooperation*. https://www.oic-oci.org/page/?p_id=52&p_ref=26&lan=en
- Podeh, E. (2018). Saudi Arabia and Israel: From secret to public engagement, 1948-2018. *Middle East Journal*, 72(4), 563–586. <https://doi.org/10.3751/72.4.12>
- Pristiandaru, D. L. (2022). *Indonesia Abstain, Ini Daftar Negara yang Dukung dan Tolak Penangguhan Rusia dari Dewan HAM*. Kompas.

<https://www.kompas.com/global/read/2022/04/08/084500870/indonesia-abstain-ini-daftar-negara-yang-dukung-dan-tolak-penanggulangan>

Putri, N. A., Studi, P., Internasional, H., & Jakarta, H. (2021). *Analisis Kepentingan China Dalam Mendukung Pakistan di Konflik Kashmir. I*, 111–119.

Reditya, T. H. (2022). *Mengapa Banyak Pemimpin Afrika Mendukung Putin dan Invasi Rusia? Halaman 2 - Kompas.com*. Kompas. <https://www.kompas.com/global/read/2022/04/06/200000970/mengapa-banyak-pemimpin-afrika-mendukung-putin-dan-invasi-rusia?page=2>

Rousseau, D. L. (2007). Identity, Power, and Threat Perception A Cross-National Experimental Study. *Journal of Conflict Resolution*, 51.

Rufinaldo, R. C. (2021). *Iran pulihkan hubungan dengan China untuk lawan blok Barat*. Anadolu Agency. <https://www.aa.com.tr/id/dunia/iran-pulihkan-hubungan-dengan-china-untuk-lawan-blok-barat/2192422>

Ryack, G. (2020). *A Hitch in the Belt and Road in Myanmar – The Diplomat*. <https://thediplomat.com/2020/12/a-hitch-in-the-belt-and-road-in-myanmar/>

Safoora. (2019). *Saudi prince defends China's use of internment camps for Uighur Muslims*. <https://archive.siasat.com/news/saudi-prince-defends-chinas-use-internment-camps-uighur-muslims-1470526/>

SCO, S. of. (2022). *The Shanghai Cooperation Organisation | SCO*. http://eng.sectsc.org/about_sco/

Singh, G. (2021). *The ASEAN disunity over AUKUS | ORF*. <https://www.orfonline.org/expert-speak/the-asean-disunity-over-aukus/>

Sorongan, T. P. (2022). *Benarkah Banyak Warga Indonesia Dukung Rusia?* CNBC Indonesia.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220311143110-4-322059/benarkah-banyak-warga-indonesia-dukung-rusia>

Stein, J. G. (2017). *Threat Perception In International Relations*. *University Surrey*.

<https://www.surrey.ac.uk/politics/research/researchareasofstaff/isppsummeracademy/instructors-Threat-Perception-in-International-Relations>

Sulistiyawati, L. (2021). *AS Ajak Lebih Banyak Negara Arab Normalisasi Hubungan Israel*. *Republika*.

<https://republika.co.id/berita/qzpw2366/as-ajak-lebih-banyak-negara-arab-normalisasi-hubungan-israel>

Taylor-Lind, A. (2017). *Burma: Pembantaian Secara Sistematis di Desa Rohingya* | *Human Rights Watch*.

<https://www.hrw.org/id/news/2017/12/19/312590>

Tilman, R. O. (1987). *Southeast Asia And The Enemy Beyond: ASEAN Perceptions of External Threats*. Westview.

Utomo, A. P. (2021). *PM Australia Hubungi Presiden Jokowi, Berusaha Tenangkan Indonesia soal Kapal Selam Nuklir*.

<https://www.kompas.com/global/read/2021/09/21/222657670/pm-australia-hubungi-presiden-jokowi-berusaha-tenangkan-indonesia-soal>

VoAIndonesia. (2019). *China: Investasi BRI Tingkatkan Struktur Ekonomi Pakistan*.

<https://www.voaindonesia.com/a/china-investasi-bri-tingkatkan-struktur-ekonomi-pakistan/4867856.html>

Wintour, P. (2021). *As China threat rises, can Aukus alliance recover from rancorous birth?* | *Aukus* | *The Guardian*.

<https://www.theguardian.com/world/2021/nov/23/as-china-threat-rises-can-aukus-alliance-recover-from-rancorous-birth>

- Wirawan, M. K. (2020). *Mengapa Negara-negara Arab Kini secara Resmi Mengakui Israel?* Kompas. <https://www.kompas.com/global/read/2020/12/16/070000470/mengapa-negara-negara-arab-kini-secara-resmi-mengakui-israel-?page=all>
- Yang, W. (2021). *Improving defence capabilities is key for Taiwan to line up with Aukus, say experts.* <https://www.independent.co.uk/independentpremium/aukus-defence-taiwan-china-b1922106.html>
- Yoseph, Y. (2018). *Uni Eropa Perpanjang Embargo Senjata Bagi Myanmar - Dunia Tempo.co.* <https://dunia.tempo.co/read/1083603/uni-eropa-perpanjang-embargo-senjata-bagi-myanmar>